

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Lely Indah Mindarti. 2016. *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. Malang: UB Press
- Nugroho, Riant. 2018. *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djam'an & Ann Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stevenin, T. J. (2000). *Win-Win Solutions: Mengatasi Konflik di Lingkungan Kerja*. Jakarta: Yayasan Media Buana Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API Bandung.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta Pusat: FISIP Univ Moestopo Beragama (Pers).
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: CAPS.

### Jurnal

- Monalisa, M., Andriyus, A., & Uyun, R. (2018). Implementasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi Di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(2), 509-522.

Mahmuzar, M. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 25(2), 400-423.

Dumanauw, T. (2013). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. *lex administratum*, 1(1).

Risman, H. (2015). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung di Daerah Kabupaten Kutai Barat. *Artik. dalam eJurnal Pemerintah. Integr*, (3).

Palakum, W. Y., & Sampe, S. (2021). KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN. *JURNAL POLITICO*, 10(4).

Satrya, N. L. D. P., & Parwata, A. A. G. O. PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA DI KOTA DENPASAR.

SUMAHAF, L. M. N., TAMPI, G. B., & RURU, J. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BATAS DESA RATATOTOK-BUYAT PROVINSI SULAWESI UTARA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 6(93).

Samudro, E. G. (2018). Resolusi Konflik Batas Wilayah Pasca Pemekaran Daerah Antara Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Dengan Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011–2016. *Damai dan Resolusi*

Patongloan, A. J., Salinding, M. B., SH, M., Basri, S. H., & Kn, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah. *Jurnal Akta Yudisia*, 4(1), 77-108.

## Dokumentasi

Berita Acara Kesepakatan pada Rapat Pengambilan Keputusan Batas Daerah antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat pada 23 November 2026

Berita Acara Kesepakatan Rapat Penegasan Batas Antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang yang dilaksanakan di Aie Angek Cottage Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar pada hari Sabtu, 27 Maret 2021

Berita Acara Rapat Nomor 05/BAD.I/IX/2018

Laporan Kronologis Penyelesaian Penegasan Batas Wilayah Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Nomor 130/52/Pem-Setdako/PP/V-2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Batas Daerah.

Permohonan Pembatalan Kesepakatan Rapat Penegasan Batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang Nomor 006/423/DPRD-PP/VI/2021

Surat Pernyataan Sikap KAN Gunung

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah Kota Padang Panjang.

### **Internet / Website**

Aidil, Muhammad. 2021. Kemendagri Ancam Ambil Alih Sengketa Tapal Batas Padang Panjang dan Tanah Datar. *Padangkita.com (online)*, (<https://padangkita.com>), diakses 5 Maret 2023.

Tim Redaksi. 2021. Tapal Batas Disepakati, 162 KK Terancam Dikeluarkan dari Kota Padang Panjang. *hariansinggalang.co.id (online)*, (<https://hariansinggalang.co.id>), diakses pada 5 Maret 2023.

Andi, Eri. 2021. Tapal Batas, Pemko Akan Perjuangkan Nasib Warga Padang Panjang. *hariansinggalang.co.id (online)*, (<https://hariansinggalang.co.id>), diakses pada 5 Maret 2023.

Tim Redaksi. 2021. Kisruh Tapal Batas Daerah Terus Bergulir, Walikota Dinilai Lecehkan Lembaga DPRD. *Rakyatsumbar.id (online)*, (<https://rakyatsumbar.id>), diakses pada 9 Maret 2023